



Warga Tetap Tolak Kenaikan PBB

■ DPRD Dampingi Pemkot
untuk Klarifikasi Zona Nilai Tanah

Merasa keberatan. Bagaimana penghitungannya kok nggak jelas seperti itu. Mayoritas yang di sini keberatan dengan kenaikan PBB dan mencabut perwal (Perwal No 96 Tahun 2019).

Hermawan Adi Atmaja

Warga Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Puluhan warga Kota Yogyakarta mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta untuk menanyakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta, Senin (2/3). Warga menyatakan keberatan dan menolak kenaikan PBB yang signifikan.

Pantauan Tribun Jogja, di depan gedung DPRD Kota Yogyakarta terdapat tulisan "Tolak Kenaikan PBB" menggunakan cat semprot berwarna merah di atas kain putih. Tulisan tersebut sedikit menutupi tulisan Kan-

- Warga menolak kenaikan PBB dan ingin Perwal Nomor 96 Tahun 2019 dicabut. DPRD Kota Yogya melakukan rapat konsultasi dengan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heron Poerwadi, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasasa terkait kenaikan PBB.
- Beberapa rekomendasi kepada Pemkot Yogyakarta adalah Komisi A dan Komisi B untuk mengawasi polemik kenaikan PBB.
- Komisi B dampingi Pemkot klarifikasi terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) ke BPN Kanwil DIY.
- Komisi A untuk berdiskusi dengan BPN Kota Yogyakarta terkait dengan kajian peta bidang.
- Hal ini supaya jelas dan ada ketetapan hukumnya



● ke halaman 15

GRAPIS/FAUZIA RAKITMAN

Warga Tetap Tolak Kenaikan PBB

• Sambungan Hal 9

tor DPRD Kota Yogyakarta. Selain melakukan aksi unjuk rasa, warga juga melakukan audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta.

Salah satu warga yang mengikuti aksi, Hermawan Adi Atmaja (64) mengaku keberatan dengan PBB tahun 2020. Ia mendapat kenaikan hampir 200 persen. Pada tahun 2019, ia membayar PBB sekitar Rp1,6 juta, namun pada tahun 2020, dia mendapat tagihan sebesar Rp3,3 juta.

Ia pun sebelumnya mengajukan pengurangan PBB. Tahun ini pun, ia berencana untuk mengajukan pengurangan lagi. "PBB ini kan naiknya setiap tahun. Kemarin sudah mengajukan pengurangan dapat 20 persen. Sekarang juga mau mengajukan lagi. Ya inginnya paling tidak sama dengan tahun 2019," katanya di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (2/3).

Dia menjelaskan, kedatangannya bersama dengan warga lain ke gedung wakil rakyat ini untuk mendapat penjelasan terkait kenaikan PBB yang signifikan. Dia juga menilai penghitungan untuk kenaikan PBB ini juga kurang jelas.

"Merasa keberatan. Bagaimana penghitungannya kok nggak jelas seperti itu. Mayoritas yang di sini keberatan dengan kenaikan PBB dan mencabut perwal (Perwal No 96 Tahun 2019)," ujarnya.

Cabut perwal

Hal serupa juga disam-

paikan oleh warga lain, Hari Purnomo. Ia juga menolak kenaikan PBB dan ingin agar mencabut Perwal Nomor 96 Tahun 2019. "Pertama kami ingin Perwal dicabut, tolong ditinjau kembali. Dasarnya apa menaikkan PBB? Kami hanya tahu nilai akhir PBB yang ditagih. Kalau zona nilai tanah itu dari BPN Kanwil DIY dasarnya apa? Mengapa Sleman tidak naik. Padahal di Jalan Magelang ada batas kota, yang sisi kota naik yang Sleman tidak," ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan agenda DPRD setempat yang memanggil Wali Kota Yogyakarta, Harjadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. Pemanggilan tersebut dalam rangka rapat konsultasi terkait kenaikan PBB. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan rapat merupakan upaya membangun komunikasi antara DPRD Kota Yogyakarta dan Pemkot Yogyakarta, terkait kenaikan PBB di Kota Yogyakarta.

"Ini bukan untuk mengambil keputusan, hanya untuk komunikasi," katanya.

Rapat digelar secara tertutup. Danang sempat datang menemui masyarakat sebelum akhirnya memasuki ruang badan musyawarah. Ia meminta masyarakat untuk menghargai kehadiran Pemkot Yogyakarta sebagai tamu.

"Ini rumah *njenengan*, sebagai tuan rumah, anda harus menghargai tamu yang datang. Mohon tertib," katanya.

Adapun rapat konsultasi tersebut berlangsung sekitar tiga jam. Dalam rapat konsultasi tersebut DPRD Kota Yogyakarta memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Yogyakarta terkait kenaikan PBB tersebut.

Danang Rudyatmoko mengutus Komisi A dan Komisi B untuk melakukan pengawasan terkait polemik kenaikan PBB di Kota Yogyakarta. Ia meminta komisi B mendampingi Pemkot Yogyakarta untuk melakukan klarifikasi terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ternyata dibuat oleh BPN Kanwil DIY.

"BPN Kota Yogyakarta ini kan ternyata sebagai pengguna saja, yang membuat dari regional. Maka Komisi B silahkan melakukan pengawasannya, mendampingi Pemkot koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Komisi A silahkan berdiskusi dengan BPN Kota Yogyakarta terkait dengan kajian peta bidang. Supaya jelas dan ada ketetapan hukumnya," terangnya.

"Rekomendasi dari Komisi A dan B menjadi bahan kita untuk membicarakan pada rapat konsultasi selanjutnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan rekomendasi ini menjadi putusan DPRD Kota terkait dengan pelunasan pembayaran PBB, termasuk langkah afirmatif (pengurangan)," sambungnya.

Danang menambahkan, harus ada ketetapan hukum yang jelas. Sebab masyarakat juga memerlukan kepastian untuk membayar kewajiban pajaknya. Jika memang perlu langkah afirmatif pihaknya siap menjadi tempat untuk advokasi. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005